

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
NURUL SAHIRA
NIM. 190802118**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Sahira
NIM : 190802118
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Utara, 09 September 2001
Alamat : Nibong, Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Yang Menyatakan



NURUL SAHIRA

NIM. 190802118

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NURUL SAHIRA

190802118

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

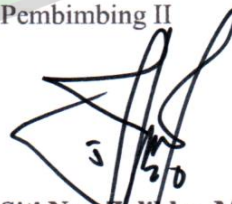
A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Reza Idria, S.HI., MA., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

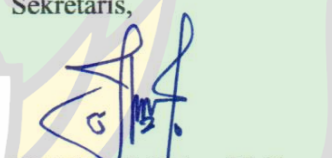
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023 M
29 Zulhijjah 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

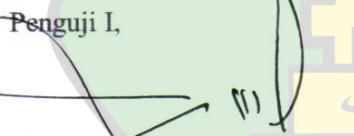
Ketua,


Reza Idria, S.HI., MA., Ph.D
NIP. 198103162011011003

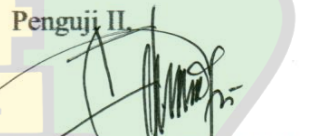
Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Penguji I,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

Penguji II,


Mukhrizal, S.IP., M.I.P
NIP. 198810202022031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M. Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Banjir adalah bencana alam yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan Aceh. Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang paling sering banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah inovasi daerah untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan daerah dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Penulisan ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Aceh Utara melalui indikator pengukuran *Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana*. Tujuan penulisan untuk mengetahui seperti apa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan menganalisis apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara. Metode Penulisan ini adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa peran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara melalui 3 indikator pengukuran yaitu pertama tahap pra bencana dengan memberikan pelatihan tentang kebencanaan kepada masyarakat, kedua tahap tanggap darurat dalam menangani banjir sehubungan dengan melakukan langkah-langkah mulai dari antisipasi bencana hingga evakuasi bencana, dan yang terakhir tahapan pasca bencana dengan membangun fasilitas penanggulangan banjir tetapi masih dalam proses pembangunan disebabkan cakupan wilayah rawan banjir yang luas dan anggaran yang terbatas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara sebaiknya terus meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia, kapasitas organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kolaborasi. Masyarakat di sekitar lokasi bencana harus dilindungi untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian materi.

Keyword: *Banjir, Mitigasi Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH UTARA” Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berikut ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag., Rektor UIN Ar-Raniry
2. Dr Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara,
4. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Reza Idria, S.HI., MA., Ph.D., Pembimbing I dan Siti Nur Zalikha, M.Si, Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A Penguji I dan Mukhrijal, S.IP., M.I.P Penguji II yang telah membimbing , mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmunya dan dukungan kepada penulis.
8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penulisan terkait proses penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Utara

9. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Prodi Ilmu Administrasi Negara seangkatan 2019, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
10. Seluruh civitas akademika Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Selain itu penulis ingin mengungkapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Ainul Mardiah serta kakak dan adik penulis yang dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah penulis lupakan jasa-jasa mereka. Sekaligus senantiasa memberikan doa dan kasih sayang kepada penulis hingga sampai pada titik ini.

Kami menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Amiin

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Nurul Sahira
NIM. 190802118

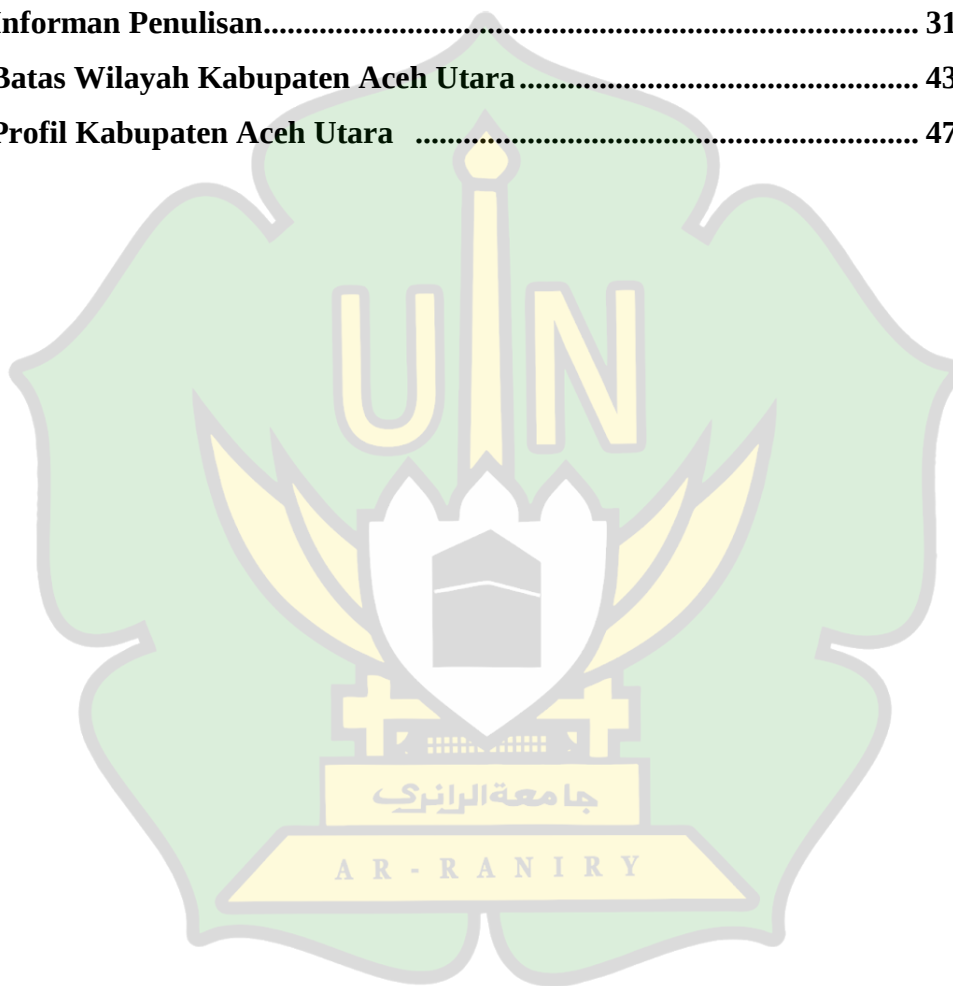
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penulisan	8
1.5. Manfaat Penulisan	8
1.6. Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTIDAKA	13
2.1. Pembahasan Penulisan yang Relevan.....	13
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Teori Peran	16
2.2.2 Konsep Peran Pemerintah.....	17
2.2.3 Teori Organisasi	21
2.3. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
2.2.1. Banjir	22
2.2.2. Jenis-Jenis Banjir	24
2.2.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26

2.4. Hambatan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara.....	29
2.5. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENULISAN.....	31
3.1. Pendekatan Penulisan	31
3.2. Fokus Penulisan	31
3.3. Lokasi Penulisan	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1. Data Primer.....	33
3.4.2. Data Sekunder	33
3.5. Informan Penulisan	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	38
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENULISAN	40
4.1. Profil Kabupaten Aceh Utara	40
4.2. Profil BPBD Kabupaten Aceh Utara	41
4.2.1. Tupoksi BPBD Aceh Utara	41
4.3 Hasil Penulisan dan Pembahasan	46
4.3.1 Peran BPBD.....	46
4.3.2. Tahap Pra Bencana.....	47
4.3.3 Tahap Tanggap Darurat	54
4.3.4. Tahap Pasca Bencana	62
4.4 Hambatan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara.....	69
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTIDAKA.....	76
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

1.1. Rekapitulasi Bencana di Aceh dari Tahun 2020-2022.....	2
1.2 Banjir di Aceh Utara Tahun 2022	4
3.1 Informan Penulisan.....	31
4.1 Batas Wilayah Kabupaten Aceh Utara	43
4.2 Profil Kabupaten Aceh Utara	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Mitigasi Bencana.....	49
Gambar 4.2. Jalur Evakuasi	52
Gambar 4.3 Tempat Pengungsian	55
Gambar 4.4. Bantuan Logistik	56
Gambar 4.5. Proses Evakuasi	57
Gambar 4.6. Proses Evakuasi Kelompok Rentan	60
Gambar 4.7. Peta Rawan Banjir	61
Gambar 4.8. Bendungan Keureuto	64
Gambar 4.9 Kondisi Jalan di Area Rawan Banjir.....	66
Gambar 4.10 Asuransi Usaha Tani	68



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penulisan	78
Lampiran 2 Dokumentasi Penulisan	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana alam sangat dekat dengan kehidupan orang di Indonesia yaitu banjir. Merupakan peristiwa yang suatu wilayah dikarenakan volume air meningkat yang disebabkan oleh daratan yang terendam.¹ Banjir merupakan ketika air di atas permukaan air normal meluap ke dasar sungai dan membanjiri tanah di sepanjang tepi sungai. Curah hujan lebih tinggi dari biasanya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Dengan demikian menyebabkan sistem pembuangan, meliputi dari sungai dan anak sungai alami maupun dari sistem penahan banjir buatan yang sudah terjadi, tidak sanggup menyerap air hujan yang menyebabkan terjadinya luapan.

Kapasitas sistem irigasi dapat berbeda dan berubah karena sedimentasi, penyempitan sungai oleh faktor alam maupun faktor buatan, dan penyumbatan akibat sampah. Hampir setiap musim, banjir melanda Indonesia. Jumlah kerusakan akibat banjir dan frekuensi banjir yang sering meningkat. Dampak negatif yang tak dapat dihindari termasuk kehilangan harta benda atau bahkan jiwa.

Provinsi Aceh adalah provinsi yang sangat rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh geologi dan geografi. Provinsi Aceh yang berada pada daerah jalur cincin api (*ring of fire*), yang mengakibatkan beberapa gunung api dan akan membuat zona subduksi

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana di akses di <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> pada tanggal 2 Februari 2023

menjadi pusat bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan penelitian dari Lingkar Sindikasi Grup menunjukkan bahwa banjir saat ini menjadi salah satu permasalahan yang paling penting dan sering terjadi di Aceh sejak beberapa tahun sebelumnya.² Hal itu bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Bencana di Aceh dari Tahun 2020-2022

Tahun	Banjir	Banjir dan Tanah Longsor	Karhutla	Angin Puting Beliung	Tanah Longsor	Kebakaran	Abrasi
2020	81 kali	6 kali	160 kali	98 kali	19 kali	33 kali	12 kali
2021	56 kali	6 kali	38 kali	29 kali	6 kali	20 kali	23 kali
2022	45 kali	15 kali	70 kali	61 kali	14 kali	103 kali	4 kali
Jumlah	182	27	268	188	39	156	39

Sumber: Website Data Aceh³

Perubahan iklim global yang menyebabkan banjir ini semakin parah. Di dataran rendah, curah hujan yang tinggi akan langsung berdampak pada genangan banjir yang lebih besar. Dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara termasuk yang paling sering banjir. Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 gampong dan 27 kecamatan. Menurut data tahun 2022, 614.640 orang (dari 5.407.855 orang yang tinggal di Aceh) tinggal di wilayah Aceh Utara, yang memiliki ketinggian rata-rata 125 meter.

² Nora, 'Kondisi Bencana Alam Di Aceh Tiga Tahun Terakhir' di akses di <https://dialeksis.com/data/kondisi-bencana-alam-di-aceh-tiga-tahun-terakhir> (di akses pada tanggal 5 Maret 2023.

^{3 3} Badan Pusat Statistik, *Rekap Data Bencana Aceh* di akses di <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/rekap-data-bencana> pada tanggal 3 Maret 2023.

Daerah yang rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara ada 19 kecamatan yaitu Kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Pirak Timu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon, Cot Girek, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Geureudong Pase, Simpan Kramat, Sawang, Muara Batu, dan Kuta Makmur.

Beberapa penyebab banjir termasuk kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal kehutanan, pengendapan dampak dari lumpur di tangkai sungai dan hilir sungai, dan meruapnya Sungai Keureuto, Sungai Pasee, dan Sungai Jambo Aye. Pepohonan yang berada di hutan seharusnya menahan tanah dari gerusan air hujan. Kabupaten Aceh Utara ada di kaki Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Hal ini mengakibatkan saat sungkup alas di dua kabupaten tersebut hilang, masyarakat di Aceh Utara juga akan terkena dampak banjir. Kerugian hutan di Aceh Utara sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan pertanian dan perkebunan di sekitar hutan.

Kabupaten Aceh Utara memiliki banyak faktor yang dapat menyebabkan bencana, termasuk dari geografi, iklim, sosial, budaya, ekonomi, dan teknis. Dari bencana alam hingga bencana non-alami, dan bencana kemasyarakatan sampai mengakibatkan kematian, lingkungan yang mengalami kerusakan, kehilangan harta benda, dan bahkan efek psikologis pada korban secara teratur, cepat, dan tepat. Faktor manusia juga sangat penting dalam hal ini, seperti tata guna tanah yang tidak akurat, pengasingan limbah ke bengawan, kawasan tinggal di area medan banjir, dan konstruksi tanah. Berkenaan dengan berikut bencana banjir yang sudah terjadi pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Bencana Banjir di Aceh Utara pada Tahun 2022

No	Tanggal	Dampak	Kerugian
1	1 Januari 2022	Banjir ini mengakibatkan 3 korban meninggal dunia, sebanyak 44.389 jiwa harus mengungsi ada 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 172 desa yang berdampak pada banjir ini.	Kerugian fisik yang dialami oleh masyarakat yaitu 1.111 rumah, 500 (Ha) dan 13 tanggul yang terkena dampak dari banjir. Selain itu, ada juga kerugian non fisik sebanyak Rp 36.879.750.000
2	27 Februari 2022	Banjir ini mengakibatkan 5.258 jiwa, 6 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 35 desa yang berdampak pada banjir ini.	Tidak ada data
3	9 Maret 2022	Banjir ini mengakibatkan 2.242 jiwa dari 630 KK, 2 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 12 desa yang berdampak pada banjir ini.	Tidak ada data
4	17 Maret 2022	Banjir ini mengakibatkan 390 jiwa dari 130 KK, 4 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 18 desa yang berdampak pada banjir ini.	Tidak ada data
5	23 Maret 2022	Banjir ini mengakibatkan 1 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 9 desa yang berdampak pada banjir ini.	Tidak ada data
5	9 Oktober 2022	Banjir ini mengakibatkan 52.449 jiwa dari 15.499 KK, 16 kecamatan (termasuk Kecamatan Matangkuli) dan 156 desa yang berdampak pada banjir ini.	Tidak ada data

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penanggulangan suatu bencana merupakan segala usaha yang meliputi dari penetapan kebijakan hingga program pemulihan pembangunan yang berakibat bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan restorasi, dan dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal tersebut, setiap kelompok masyarakat harus memenuhi kemampuan dan keahlian untuk menghadapi lingkungannya saat terjadinya kemalangan.

Resolusi bahaya ini bertujuan untuk menyediakan proteksi terhadap penduduk dari ancaman terjadinya bahaya bencana, menerapkan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanganan bahaya tersebut dengan terkoordinasi, menyeluruh, terencana, dan terpadu. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tugas demi memenuhi, mesejahterakan juga melindungi masyarakat yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis.

Dengan demikian pemerintah memiliki hak dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana mencakup mulai dari penetapan kebijakan penanggulangan bencana, menetapkan status bencana nasional maupun daerah, menetapkan peraturan mengenai aplikasi teknologi untuk pemberitahuan sumber bahaya, penyaluran kebutuhan logistik yang berskala nasional terhadap korban bencana.

Adapun hal tersebut telah dijelaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan

Penanggulangan Bencana Aceh. Serta Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6 telah dijabarkan tentang fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur Badan Penanggulangan Bencana, yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi akibat dari bencana alam. Paradigma pengaturan bencana di Indonesia telah berubah karena penanggulangan bencana. Paradigma sebelumnya lebih responsif, tetapi sekarang lebih responsif dan preventif, sehingga resiko bencana dapat diminimalkan.⁴

Demikian pula peran yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yaitu menyediakan pelayanan terhadap setiap penduduk yang terdampak bencana, menyediakan tempat tinggal sementara, membangun dapur umum, menyalurkan keperluan dari sandang serta pangan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pemulihan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana seperti pemulihan jalan dan tempat tinggal dari masyarakat yang terdampak kerusakan. Hal ini menyatakan berarti peran pemerintah dalam penanganan bencana amat serius demi menjaga serta melindungi masyarakatnya. Pemerintah Daerah setempat mesti berpedoman terhadap peta resiko bencana yang sudah dibuat sesuai dengan daerah

⁴ B.M Faturrahman, 'Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik.', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3.2 (2018), 10.

rawan bencana. Sehingga program mitigasi tentang kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan akan lebih tetap sasaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut:

1. Bencana banjir selalu terjadi setiap tahun di Aceh Utara.
2. Dampak yang timbul akibat banjir tersebut menimbulkan kerugian dari fisik maupun non-fisik terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Belum optimalnya peran BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Utara

1.3. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut

1. Bagaimana peran BPBD dalam penanggulangan banjir Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa hambatan dalam penanggulangan banjir Kabupaten Aceh Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut

1. Demi mendeskripsikan dan menelaah peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
2. Untuk melihat hambatan yang menjadi penghalang dalam penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberi kita lebih banyak informasi tentang apa yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani banjir di Aceh Utara dan bagaimana BPBD melakukan perannya untuk mengatasi banjir tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memperoleh pandangan yang baru tentang bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menangani bahaya banjir di Kabupaten Aceh Utara.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Penanggulangan

Penanggulangan bencana yakni suatu unsur yang tak terpisahkan dari usaha sebuah pembangunan regional, yang juga melibatkan serangkaian tindakan penanggulangan yang dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Terlalu sering pemerintah hanya memberikan tanggapan yang sepotong-sepotong terhadap bencana.⁵ Paradigma yang sebelumnya lebih responsif telah berubah menjadi lebih inklusif, mempertimbangkan tidak hanya responsif tetapi juga preventif, untuk mengurangi resiko bencana sebanyak mungkin.⁶

Penanggulan banjir dalam penelitian ini ada dalam 3 tahapan, sebagai berikut:

1) Pra Bencana

Penanggulangan pada tahapan pra bencana telah adanya pelaksanaan program mitigasi kebencanaan yang diperuntukkan bagi pelajar maupun masyarakat dewasa, telah adanya pembuatan jalur evakuasi yang di bangun di daerah rawan banjir dalam hal ini di Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Langkahan, serta telah adanya tempat pengungsian di daerah-daerah rawan banjir.

⁵ Departemen Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2007

⁶ Faturrahman, 'Konseptualisasi Mitigasi Becana Melalui Perspektif Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2018. 3(2). 7.

2) Tanggap Darurat

Penanggulangan pada tahapan tanggap darurat telah adanya pelaksanaan prioritas penyelamatan terhadap kepada kelompok rentan, serta melakukan penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena banjir, dan memberikan peyaluran bantuan kebutuhan sandang dan pangan kepada masyarakat yang terkena banjir.

3) Pasca Bencana

Penanggulangan pada tahapan tanggap darurat telah adanya pelaksanaan pencatatan data kerusakan setelah bencana, serta pelaksanaan pemulihan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, dan adanya pemulihan sarana dan pra sarana yang rusak akibat banjir.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara

Menurut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, melakukan urusan ketatausahaan, melaksanakan penilaian serta pelaporan, membuat program penangkalan dan kewaspadaan terhadap bencana, menyalurkan perbekalan, melaksanakan rehabilitasi dan resolusi, dan pemadam kebakaran.

3. Mitigasi Bencana

Serangkaian usaha untuk dapat menurunkan dan mengatasi akibat bencana, baik lewat pembangunan fisik maupun pelatihan serta pengembangan keahlian untuk mengalami ancaman bahaya merupakan mitigasi bencana. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah manajemen bencana yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah korban dan kerugian yang terjadi selama bencana.⁷

Tujuan dari penyelenggaraan mitigasi bencana, sebagai berikut:

- 1) Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi (*economy costs*) dan kerusakan sumber daya alam.
- 2) Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat (*public awareness*) dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman (*safety*).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pembahasan penelitian yang relevan ini dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana masalah yang peneliti perhatikan yang pernah diteliti oleh orang lain secara substansial. Terakhir dengan kajian pustaka tersebut, peneliti dapat mengatasi penelitian yang serupa, maka dari itu posisi peneliti menjadi jelas. Mengenai penulisan yang berkaitan dengan objek kajian ini, maka peneliti memperoleh sejumlah pandangan penulisan tersebut dibawah, diantaranya:

1. Novan Suryadi (2020), Jurnal Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Universitas Mulawarman, dengan judul penelitian “Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda”.⁸ Kesimpulan dari penelitian menunjukkan sebenarnya peran Pemerintah dalam pengelolaan resiko banjir di Kota Samarinda sudah baik. Penanganan bencana dilaksanakan dengan cara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan situasi. Hubungan yang baik telah terjalin dengan instansi/layanan terkait untuk menangani bencana, lembaga-lembaga ini menyadari koordinasi yang tepat dan saling mendukung, dan keterlibatan yang seimbang dari berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Selain itu, kerjasama pemerintah-kota dalam pengelolaan resiko bencana banjir juga baik, karena diketahui bahwa

⁸ Novan Suryadi, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, (2020), 36-40.

pemerintah kota berpartisipasi dalam konsultasi/rapat kerja bahwa dilaksanakan BPBD Provinsi dan lembaga terkait lainnya. Pelayanan dari masyarakat juga harus turut serta dalam pelestarian lingkungan agar tidak terjadi banjir saat hujan terus. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Perbedaannya penelitian ini lebih umum, sementara dalam skripsi peneliti dikhususkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selain itu juga dengan lokasi penelitian skripsi peneliti berada di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara.

2. Ayu Anggita Sari, dkk (2020), Jurnal dari Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, dengan judul penelitian “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik”.⁹ Kesimpulan dari penelitian menunjukkan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik selalu berupaya meningkatkan kapasitas peralatan, peningkatan kapasitas peralatan membutuhkan anggota/staf untuk meningkatkan layanan dan kemampuan mereka dalam mengatasi bahaya banjir. Mengenai ini dinilai diperlukan sebab memudahkan evakuasi korban jiwa jika terjadi bencana. Adapun Program Penempatan Sarana dan Logistik Pemberian bantuan kepada korban banjir perlu akurat. Dengan demikian BPBD Kabupaten Gresik telah melaksanakan survei ke wilayah terdampak banjir serta menentukan siapa yang patut mendapatkan bantuan.

⁹ Anggita Sari. 2020. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik.. 2(5). 23-33

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menerapkan teknik kualitatif untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya terkait suatu hal menurut pandangan manusia yang dikaji. Perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan dalam manajemen bencana banjir, sementara dalam skripsi peneliti fokusnya dalam penanggulangan banjir, selain itu juga dengan lokasi penelitian skripsi peneliti berada di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara.

3. Skripsi Kusumajati (2016) yang berjudul “Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan sebenarnya BPBD memainkan peran penting dalam penanganan bencana alam di Desa Windurejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Peran BPBD ini mencakup langkah-langkah pencegahan sebelum bencana terjadi, tanggap darurat serta upaya pemulihan sesudah bencana. Dengan upaya penanggulangan bencana, peran BPBD terkait dengan fungsi koordinasinya. BPBD adalah lembaga yang bertanggung jawab atas semua koordinasi dalam penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran seluruh prosesnya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menerapkan teknik kualitatif untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya terkait suatu hal menurut pandangan manusia yang dikaji. Perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan dalam manajemen bencana alam, sementara dalam skripsi peneliti fokusnya dalam penanggulangan banjir, selain itu juga dengan lokasi penelitian

¹⁰ Kusumawati, Dra. Hj. Sri Afiah. 2016. *Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Thesis. 22-27

skripsi peneliti berada di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menerapkan teknik kualitatif untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya terkait suatu hal menurut pandangan manusia yang dikaji. Untuk perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan dalam manajemen bencana banjir dan manajemen bencana alam, sementara dalam skripsi peneliti fokusnya dalam penanggulangan banjir, selain itu juga dengan lokasi penelitian skripsi peneliti berada di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara yang berbeda dengan beberapa pembahasan penelitian di atas.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Peran

Peran merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu perkumpulan. Peran yang perlu dilakukan oleh suatu perkumpulan kebanyakan ditata dalam suatu peraturan yakni fungsi dari organisasi. Ada dua jenis peran yaitu diharapkan dan yang dilakukan. Ada juga yang melahirkan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya.¹¹

¹¹ Faturrahman. 2018. *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. 3(2). 10.

Teori peran dalam Ilmu Psikologi Sosial dan Ilmu Sosiologi mengidentifikasi mayoritas kegiatan rutin sebagai aktivitas dalam kategori sosial. Setiap peran sosial terdiri dari kumpulan hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang harus dihadapi serta dilaksanakan oleh seseorang. Pola tersebut didasari oleh pengamatan bahwa orang berperilaku melalui cara diperkirakan maupun berarti perilaku seseorang tergantung pada ketentuan tertentu, seperti kondisi sosial mereka dan faktor lain.

Adapun menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono mengatakan bahwa "peranan" merupakan sebuah ide tentang kemampuan seseorang yang penting untuk struktur sosial masyarakat dan mencakup standar yang dibentuk oleh posisi di dalam sebuah masyarakat. Dengan kata lain, peran yaitu sebuah set aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, biasanya ada suatu pekerjaan yang berperan dalam mengatur sumber daya manusia terhadap suatu organisasi. Satuan kerja ini bertanggung jawab atas berbagai tugas dan prosedural yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia.¹²

2.2.2 Konsep Peran Pemerintah

Pemerintah Daerah menurut Tjandra adalah Pemerintah (*government*) dilihat dari pengertiannya adalah pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dll. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam

¹² Siagian, Sondang. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 34-37

arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.¹³

Dalam UU No 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya:

1. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
2. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
2. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
3. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

¹³ Tjandra, R. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 57

4. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
5. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara dibentuk untuk dapat melakukan upaya pemerintah untuk menangani bencana dengan cara keseluruhan, mulai dari sebelum bencana, saat bencana terjadi, dan setelah bencana. Tindakan tersebut dikenal yaitu penanggulangan bencana. Diharapkan bahwa tindakan penanggulangan bencana dapat mencegah dan mengurangi ancaman bencana.

Demikian pula Peran menurut Koentjaraningrat dalam buku Rivai, peran berarti tindakan seseorang yang tidak berhubungan dengan suatu posisi tertentu, sehingga ide peran tersebut mengarah terhadap model perilaku yang diinginkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu di dalam sebuah organisasi maupun sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran didefinisikan dari suatu perkumpulan harapan manusia tentang cara seseorang perlu bertindak dalam kondisi tertentu yang didasari oleh status dan fungsi sosialnya.¹⁴

Untuk mencapai penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, BPBD telah mengatur sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan penanggulangan bencana dengan baik. Untuk memastikan penanggulangan bencana yang efektif, BPBD dirancang untuk memprioritaskan penanggulangan bencana secara keseluruhan bukan

¹⁴ Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Publik..* Jakarta: PT Grafindo Persada. 43

hanya saat tanggap darurat dengan menekankan kepada manajemen resiko bencana di setiap aspek.¹⁵

Diharapkan BPBD Kabupaten Aceh Utara merespons dengan baik dan terus meningkatkan potensinya dalam mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat organisasi, memperluas fasilitas, dan meningkatkan kemitraan. Untuk mengurangi korban dan kerugian materi, masyarakat di sekitar daerah rawan banjir harus dilindungi. Untuk menangani banjir di Kabupaten Aceh Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan hal yang serupa. Melakukan evaluasi cara-cara dimana ancaman dan kerentanan dapat dikurangi akibat bencana, serta mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menangani setiap terjadinya ancaman bencana.

Dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, BPBD juga memberikan pelayanan kepada penduduk yang terdampak bencana, seperti membangun dapur umum, menyiapkan tempat atau posko tanggap darurat, dan menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga memperbaiki atau memulihkan prasarana dan infrastruktur, seperti memperbaiki jalan dan rumah dari masyarakat yang rusak. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani bencana untuk menjaga dan melindungi rakyatnya. Dengan adanya BPBD ini, yang mempunyai wewenang untuk menangani bencana, terutama banjir diharapkan akan muncul profesionalitas dalam penerapan manajemen bencana yang lebih baik.

¹⁵ Ramadhan, Matondang. 2016. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik.. 4(2). 175–181.

2.2.3. Teori Organisasi

Teori Organisasi didefinisikan sebagai sebuah skema yang mempunyai struktur perencanaan yang dilaksanakan dengan murni di mana manusia bekerja sama serta berangkaian satu sama lain untuk mengapai hajat tertentu. Organisasi merupakan perkumpulan yang mencakup dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mengapai hajat tertentu. Dalam suatu perhimpunan, mencakup kaitan antar sesama anggota dan kelompok, serta antara pemimpin dan bawahan. Adapun menurut Wursanto, unsur-unsur organisasi juga terdiri dari manusia, tujuan bersama, peralatan, kerja sama, lingkungan, dan kekayaan alam.¹⁶

Untuk meningkatkan efisiensi di dalam sebuah organisasi, masing-masing pemimpin tersebut memilih untuk membagi tugas ke dalam peran masing-masing yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan menerapkan prosedur dan peraturan ketat untuk memastikan bahwa prosedur dan peraturan dilaksanakan. Sedangkan dari serangkaian prinsip-prinsip sebuah pengorganisasian menunjukkan inti dari persepsi kebanyakan para teoritis klasik yang mencakup hal-hal yang menyertai:

1. Pembagian Kerja
2. Penetapan tugas-tugas,
3. Keutuhan Komando
4. Keutuhan Tujuan
5. Rentang Penanganan yang Elusif

¹⁶ Wursanto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 37

6. Keseimbangan Kekuasaan dan Tanggung Jawab.¹⁷

Adapun menurut Lubis dan Husaini bahwa organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berkomunikasi sesuai dengan pola tertentu, dengan setiap anggota mempunyai tugas dan fungsi tertentu.¹⁸ Organisasi ini adalah kumpulan orang yang memiliki arah tertentu dan pemisah yang tepat dan terstruktur, maka dari itu mereka bisa dipisahkan dari distriknya.¹⁹

2.3. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.3.1. Banjir

Banjir terjadi ketika air melimpah dari palung sungai yang tidak lebih rendah dari tinggi muka air normal, yang membuat genangan di area rendah di tepi sungai. Curah hujan yang tidak seperti biasanya juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Ketika daerah tanah yang umumnya kering terendam air akibat curah hujan yang tinggi serta tanah rendah batas cekung dapat dikatakan banjir. Secara lebih jelas, ada beberapa penyebab banjir, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun karena kegiatan manusia itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Curah hujan yang melebihi rata-rata normal
2. Tata letak yang mesti sesuai
3. Pembabatan hutan

¹⁷ Kenneth, Gary. 2008. *Perilaku Organisasi Dan Psikologi Personalita*. Jakarta: Rineka Cipta. 22-25

¹⁸ Susilo Martoyo. 2007. *Perilaku Organisasi, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 36

¹⁹ Lubis, Huseini. 2010. *Organization Management Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI. 48

4. Pengecilan sungai
5. Pemisahan sampah ke saluran air, sungai, dan laut
6. Jebolnya bendungan
7. Penyusutan muka jalan
8. Pengikisan dataran/ erosi²⁰

Mayoritas wilayah di Indonesia menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Contoh daerah yang sering terjadi banjir yaitu Kabupaten Aceh Utara, yakni lokasi penelitian dalam penulisan skripsi penulis. Kawasan rawan banjir dikategorikan menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1. Kawasan pantai
2. Kawasan tanah banjir (*floodplain*)
3. Kawasan pinggir sungai
4. Kawasan cekungan

2.3.2. Jenis-Jenis Banjir

Adapun yang termasuk jenis-jenis banjir, yaitu sebagai berikut:

1. Banjir Bandang

Bahwa banjir yang muncul secara mendadak serta sangat mematikan disebut banjir bandang. Banjir model tersebut terjadi rentang waktu yang singkat sesudah hujan lebat, biasanya beberapa menit hingga beberapa jam, dan terjadi di sekumpulan

²⁰ Srie Julie Rachmawatie. 2016. *Ensiklopedia Mitigasi Bencana Banjir*. Surakarta: PT Borobudur Inspira Nusantara. 31-32

Daerah Aliran Sungai (DAS) atau alur sungai yang sempit. Banjir bandang biasanya terbentuk di tempat di mana sungai terhalang oleh sampah.²¹

2. Banjir Hujan Ekstrim

Banjir hujan ekstrim disebabkan lantaran air sungai meluap dengan amat cepat, apalagi kalau kondisi jalur sungai tidak kokoh maka dari itu tidak dapat menopang volume air yang meningkat. Banjir hujan ekstrim juga bisa diakibatkan oleh tanggul yang tidak dapat menopang volume air yang terus bertambah, es yang mendadak mencair, atau peralihan besar lainnya yang terjadi di daerah muara sungai. Istilah lain dari banjir hujan ekstrim adalah banjir kilat.²²

3. Banjir Luapan Sungai atau Banjir Kiriman

Banjir luapan sungai atau banjir kiriman sering terjadi pada musim panas atau musim panas. Banjir ini umumnya di kawasan dataran rendah, dan air banjir tersebut bersumber dari daerah dataran tinggi yang jauh dari daerah dataran rendah yang mengelilingi terjadilah banjir. Ibu kota Indonesia, Jakarta adalah daerah yang paling sering dilanda banjir kiriman. Airnya berasal dari daerah Bogor, yang berada di dataran tinggi. Banjir luapan sungai biasanya muncul secara tiba-tiba tanpa adanya peristiwa cuaca sebelumnya. Banjir ini dapat berlangsung sehari-hari bahkan dapat berminggu-minggu.

²¹ Ibid. 33

²² Ibid. 34

4. Banjir Pantai atau Banjir Rob

Banjir rob biasanya melanda wilayah pemukiman yang dekat dengan pantai karena air laut mengenang dataran. Banjir rob semakin melanda wilayah pesisir juga disebabkan oleh faktor alam dan tindakan manusia.

5. Banjir Lahar Dingin

Banjir lahar dingin dapat membahayakan lingkungan sekitar dan makhluk hidup. Disebabkan banjir ini dapat mengeluarkan material padat, gas, dan cair. Banjir lahar dingin yakni banjir yang umumnya terjadi selama musim penghujan ketika gunung berapi erupsi. Jika hujan frekuensi tinggi terjadi, tumpukan material erupsi akan dibawa ke tempat yang lebih rendah.²³

6. Banjir Lumpur

Banjir yang diakibatkan oleh lumpur yang berawal dari dalam tanah dan akan menenggelamkan tanah adalah banjir lumpur. Beberapa karakteristik banjir ini mirip dengan banjir bandang. Tidak seperti lumpur biasa, lumpur tersebut mengandung bahan kimia berbahaya. Hingga saat ini, masalah lumpur lapindo dan sidoarjo masih belum ditangani.²⁴

²³ Ibid. 35-37

²⁴ Ibid. 38-42

2.2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembaga pemerintah yang berperan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan bencana di tingkat daerah disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga pemerintahan tersebut biasanya berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan berperan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Peran BPBD sangat penting dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat serta aset di tingkat daerah. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana dan memberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara didirikan untuk melakukan usaha pemerintah untuk menangani bencana secara keseluruhan, sedari masa prabencana, masa tanggap darurat, dan pasca bencana. Proses ini dikenal sebagai manajemen bencana. Tanggap darurat bencana adalah salah satu jenis penanggulangan bencana, bahwa kumpulan tindakan yang dilakukan saat bencana terjadi untuk menangani efek bencana. Selama bertahun-tahun, bencana alam telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikontrol manusia. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan menangani jumlah korban yang diperlukan, masyarakat harus lebih sadar dan siap menghadapi bencana. Karena Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap bencana, masyarakat idealnya sudah menyadari dan siap menghadapi bencana ini melalui kearifan lokal daerah setempat.

Pemerintahannya seringkali hanya menangkap sebagian bencana. Penanggulangan bencana hanya dapat dilakukan melalui pendekatan saat bencana

terjadi. Pemerintah bertugas untuk melaksanakan manajemen bencana, termasuk fokus pada rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana. Gangguan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh perilaku manusia yang salah dalam mengelola sumber daya air.

Melalui manajemen bencana ini, kita dapat mengantisipasi dan mengurangi potensi ancaman yang mungkin terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal Deby bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Utara memiliki dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Supaya dapat mencapai penanganan bahaya yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara dirancang dengan baik agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Tujuan tersebut meliputi tidak hanya tanggap dalam situasi darurat, tetapi juga menyalurkan perhatian bagi semua prospek penanganan bencana dengan fokus pada manajemen resiko bencana.²⁵

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab mengawasi segala aktivitas penanggulangan pada setiap tahapan bencana. Adanya pengawasan tersebut, diharapkan segala aktivitas penanggulangan bisa sesuai rencana dan menghindari penyelewengan dana penanggulangan bencana. Selain itu, dalam penanggulangan bencana yang kuat sehingga penyelenggaraannya bisa dilaksanakan secara terencana, terarah, dan lebih berkesinambungan. Pencegahan bencana bisa dilakukan yakni melarang pembakaran hutan, penambangan batu di daerah curam, atau bahkan bisa dilakukan melalui peringatan dini.

²⁵ Ramadhan, Matondang. 2016. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana Alam*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik.. 4(2). 176–185

Usaha untuk membagikan sinyal peringatan pada masyarakat bahwa kemungkinan bahaya akan segera terjadi adalah sistem peringatan dini. Hal yang harus diperhatikan dalam peringatan dini yakni:

1. Mampu menjangkau masyarakat luas (*accessible*)
2. Sifatnya segera (*immediate*)
3. Tegas (*coherent*)
4. Resmi (*official*)²⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai Penegakan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang melibatkan pembuatan ketetapan pembangunan resiko bencana, pencegahan bencana, bantuan dan rehabilitasi. Langkah-langkah perlindungan sipil bertujuan untuk mempersingkat tahun bencana yang mendatang. Proses penanggulangan bencana meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pra Bencana

Pelaksanaan penanganan sebelum bencana menurut yang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya bencana, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, memperingatkan masyarakat secara dini, dan melakukan usaha pemulihan dampak bencana. Melaksanakan program kesiapsiagaan bencana merupakan tindakan pokok yang dilaksanakan guna mensiasati kemungkinan terjadinya bencana melalui tindakan yang efektif. Dengan adanya kesiapsiagaan ini, masyarakat harus

²⁶ Srie Julie Rachmawatie, *Ensiklopedia Mitigasi Bencana Banjir*. (Surakarta: PT Borobudur Inspira Nusantara, 2016). 43-47

lebih berhati-hati dan siap jika suatu saat terjadi bencana. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko bencana.

Mitigasi struktural yakni upaya mitigasi dengan meminimalkan bencana dengan cara pembangunan bencana dengan cara pembangunan berbagai sarana fisik yang memadukan teknologi. Contohnya bangunan prasarana fisik seperti pembangunan bendungan untuk pencegahan terjadinya banjir. Mitigasi non struktural yakni upaya yang dilakukan untuk mengatasi maupun mengurangi resiko bencana dengan menyusun kebijakan dengan tujuan menghindari resiko yang lebih merusak. Kebijakan non struktural mencakup kebijakan-kebijakan legislasi, serta mengadakan pelatihan atau mitigasi tentang kebencanaan.²⁷

2. Tanggap Darurat

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, program tanggap darurat bencana adalah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan ketika bencana terjadi dengan tujuan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Penanganan saat keadaan tanggap darurat akibat bencana bisa dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan yang terjamin, serta perbaikan sarana dan prasarana.

3. Pasca Bencana

Setelah terjadinya suatu bencana, penanganan dapat dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi juga rekonstruksi. Menurut UU No 24 tahun 2007, rehabilitasi

²⁷ Ibid. 45-47

yakni tindakan memperbaiki serta mengembalikan segala bagian layanan publik hingga mencapai tingkat yang sesuai di kawasan sesudah terjadi bencana. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan normal dan kelancaran semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah sesudah bencana. Penanganan keadaan darurat akibat bencana bisa dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban terdampak banjir, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan terjamin, juga perbaikan fasilitas sarana dan prasarana.²⁸

2.3 Hambatan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara

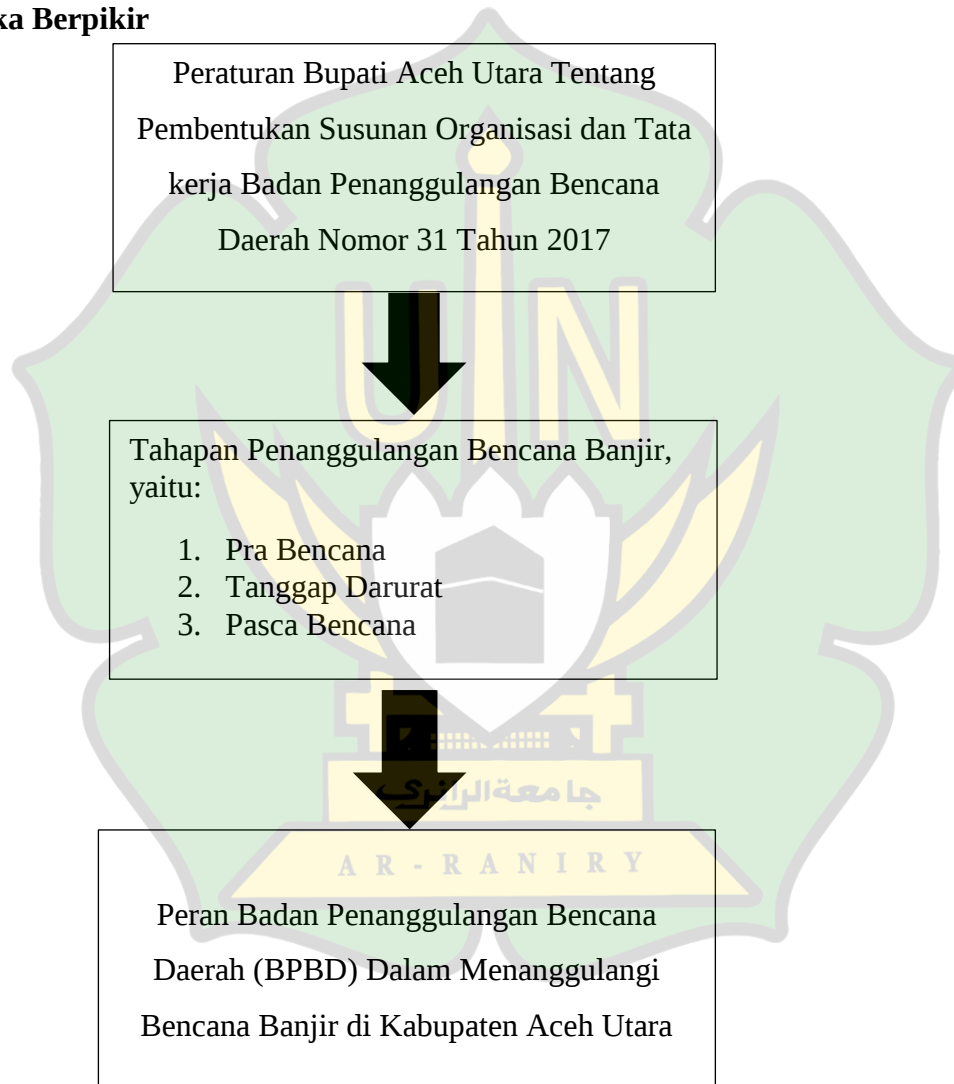
Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 gampong serta 27 kecamatan dan yang termasuk daerah yang berpotensi rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara ada 19 kecamatan yaitu Kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Pirak Timu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon, Cot Girek, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Geureudong Pase, Simpan Kramat, Sawang, Muara Batu, dan Kuta Makmur.

Sehingga dalam hal ini proses penanggulangan banjir di saat semua daerah tersebut sedang mengalami bencana banjir secara bersamaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara harus membagi baik dari peralatan untuk proses evakuasi serta sumber daya manusia yang ada ke setiap titik banjir. Dengan demikian hambatan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara masih

²⁸ Ibid. 49.

adanya kekurangan peralatan untuk proses evakuasi dan sumber daya manusianya karena cakupan daerah yang rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara yang sangat luas.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam John W. Creswell Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana orang yang melakukan penelitian berusaha untuk mengetahui keadaan sosial secara bertahap dengan membedakan, meniru, dan mengelompokkan subjek penelitian mereka. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif yakni upaya untuk memberikan perspektif manusia tentang subjek yang diteliti. Untuk studi kasus ini, Kabupaten Aceh Utara adalah yang paling rentan terhadap bencana banjir setiap tahun dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini yakni untuk mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara. BPBD memiliki peranan untuk memberikan pelayanan kepada penduduk dalam situasi bencana, hal ini sebagai berikut:

1. Pra Bencana

Membangun infrastruktur dan membuat program kerja untuk mengatasi dan mencegah bencana atau mengurangi resiko banjir di Kabupaten Aceh Utara, seperti membangun DAM atau tanggul, dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana untuk masyarakat yang di kawasan rawan banjir.

2. Tanggap Darurat

Penanganan tanggap darurat dilakukan saat terjadi bencana untuk mengatasi efek negatifnya, seperti penyaluran bantuan logistik, penanganan pengungsian, penyelamatan, dan pemulihan fasilitas penduduk yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.

3. Pasca Bencana

Pelaksanaan pemulihan program rehabilitas dan rekonstruksi pada penduduk yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas supaya mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana maupun pemberdayaan masyarakat.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara serta di daerah yang rawan banjir (Kecamatan Matangkuli). Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara beralamat di Desa Alue Drien, Kec. Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan

lokasi penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran BPBD Aceh Utara dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Dalam proses penelitian ini dimulai dari Tanggal 1 Maret 2023.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui data akurat yang bersumber dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara dan penduduk yang terdampak banjir.

3.4.2 Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Aceh Utara No 31 Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Utara dan buku-buku tentang bencana banjir.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang diinginkan bagi peneliti untuk dianalisis. Informan penelitian diputuskan secara sengaja serta berperan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada masa penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan. Teknik *purposive sampling*, yang berarti sampel

dipilih secara sengaja oleh peneliti, digunakan untuk menentukan informan penelitian ini.¹ Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari 11 orang diantaranya:

1. Mulyadi, S.Kep., M.Kes., seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, beragama islam, Pendidikan terakhir adalah S2 Kesehatan. Informan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Utara.
2. Chairuddin, S.Sos., seorang Kepala Bidang Logistik dan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, beragama islam, Pendidikan terakhir adalah S1 Sosial. Informan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Utara.
3. Alfian, S. Sos., seorang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, beragama islam, Pendidikan terakhir adalah S1 Sosial. Informan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Utara.
4. Darsa, S. Sos., seorang Koordinasi Lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, beragama islam, Pendidikan terakhir adalah S1 Sosial. Informan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Utara.
5. Effendi seorang mantan kepala Desa Siren yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan berprofesi sebagai seorang petani.

¹ Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 67

6. Nurdin seorang masyarakat Desa Siren yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan. Informan berprofesi sebagai seorang Wiraswasta.
7. Rasyidah seorang masyarakat Desa Siren yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan yaitu seorang ibu rumah tangga.
8. Syukri seorang masyarakat Desa Lawang yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan berprofesi sebagai seorang petani.
9. Ibrahim seorang masyarakat Desa Lawang yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan berprofesi sebagai seorang Wirausaha.
10. Rabiah seorang masyarakat Desa Tanjung Haji Muda yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan yaitu seorang ibu rumah tangga.
11. Ainul Mardiah seorang masyarakat Desa Tanjung Haji Muda yaitu daerah yang rawan banjir di Aceh Utara, beragama Islam, Pendidikan terakhir adalah SMA. Informan yaitu seorang ibu rumah tangga.

Adapun yang menjadi subjek di penelitian ini sebanyak 11 orang sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Mulyadi, S.Kep., M.Kes.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Informan dipilih karena beliau memiliki informasi dan data yang dibutuhkan peneliti pada tahap pra bencana
2	Chairuddin, S.Sos.	Kepala Bidang Logistik dan Tanggap Darurat	Informan dipilih karena beliau memiliki informasi dan data yang dibutuhkan peneliti pada tahap tanggap darurat
3	Alfian, S. Sos.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Informan dipilih karena beliau memiliki informasi dan data yang dibutuhkan peneliti pada tahap pasca bencana
4	Darsa, S.Sos.	Koordinasi Lapangan	Informan dipilih karena beliau memiliki informasi dan data yang dibutuhkan peneliti pada saat turun ke lapangan
5	Rasyidah	Masyarakat Desa Siren	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
6	Effendi	Masyarakat Desa Siren	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
7	Nurdin	Masyarakat Desa Siren	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
8	Syukri	Masyarakat Desa Lawang	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
9	Ibrahim	Masyarakat Desa Lawang	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
10	Rabiah	Masyarakat Desa Tanjong Haji Muda	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir
11	Ainul Mardiah	Masyarakat Desa Tanjong Haji Muda	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir serta yang terdampak banjir

Sumber: Hasil Penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik, sebagai berikut:

1. Wawancara

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas, wawancara diterapkan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari mulut informan. Penelitian ini berfokus pada wawancara dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara serta anggota masyarakat yang terkena dampak bencana banjir.

2. Observasi

Selain dari wawancara, observasi juga dilaksanakan dengan cara langsung di daerah-daerah yang rawan bencana banjir dengan melalui pengamatan dan pencatatan dengan cara sistematis dan terkoordinir.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, dokumentasi yakni bukti yang menunjang penelitian. Dokumentasi dalam bentuk gambar, rekaman, rekaman audio, maupun catatan rangkuman wawancara pada masa melakukan penelitian dengan pihak-pihak berhubungan dari penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memperoleh serta menyusun transkrip wawancara atau bahan yang diperoleh di lapangan untuk menemukan ide dan rumusan kerja yang disarankan oleh data.² Analisis data adalah proses mengarahkan, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

Adapun untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu melaksanakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah ringkasan data yang memberikan perhatian khusus pada bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menangani bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data agar mereka dapat menarik kesimpulan dari objek yang diteliti, dengan demikian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, dikenal sebagai penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

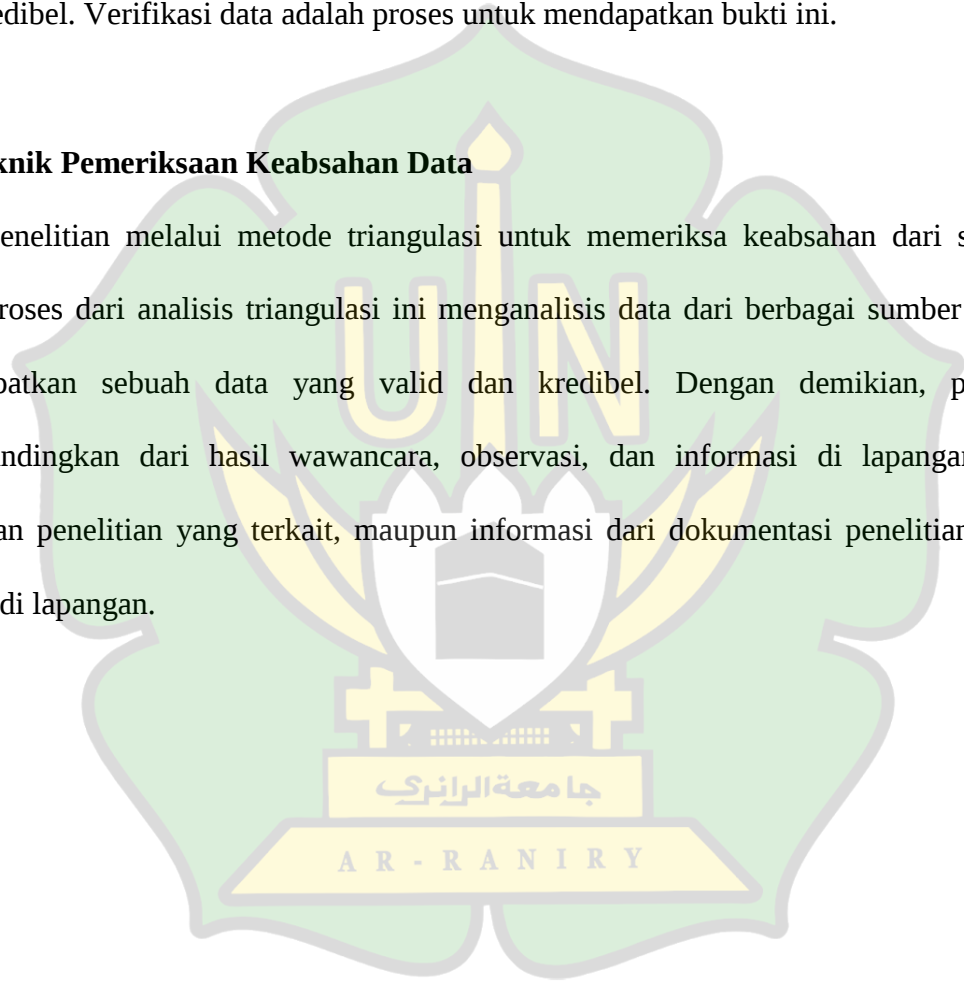
Kesimpulan awal yang disampaikan pada tahap awal pengumpulan data hanyalah sementara dan dapat beralih jika tidak diperoleh bukti yang kuat pada

² Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, in *Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 54.

tahap penyatuan data berikutnya. Namun, jika data yang disampaikan pada tahap awal didasarkan pada bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal tersebut menjadi kredibel. Verifikasi data adalah proses untuk mendapatkan bukti ini.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian melalui metode triangulasi untuk memeriksa keabsahan dari sebuah data. Proses dari analisis triangulasi ini menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan sebuah data yang valid dan kredibel. Dengan demikian, peneliti membandingkan dari hasil wawancara, observasi, dan informasi di lapangan dari informan penelitian yang terkait, maupun informasi dari dokumentasi penelitian yang berada di lapangan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara terletak di bagian utara Provinsi Aceh, menurut Peta Bakosurtanal. Geografisnya, perbatasan Kabupaten Aceh Utara dengan daerah lain telah berubah. Ada beberapa pemekaran wilayah, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Sebelah Utara	Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Timur
Sebelah Selatan	Kabupaten Bener Meriah
Sebelah Barat	Kabupaten Bireuen

Sumber: Hasil Penelitian

Topografi Aceh Utara sangat beragam, mulai dari dataran rendah yang luas di utara yang membentang dari barat ke timur hingga daerah pegunungan di selatan. Karena jalan lintas timur Sumatera melintasi dataran rendah Aceh Utara, dataran rendah ini lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan wilayah pedalaman selatan. Saat curah hujan tinggi di selatan, dataran rendah lebih sering banjir. Banjir kiriman dari

selatan sering terjadi di daerah seperti Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah Luas, Tanah Pasir, dan Meurah Mulia. Kecamatan-kecamatan tersebut, masyarakat Aceh Utara menghadapi luapan sungai Keureuto dan Sungai Pasee setiap tahun.

Pada daerah dataran rendah, persawahan dan pemukiman penduduk terdiri dari lahan pertanian; di pesisir, tambak perikanan air asin. Wilayah dataran tinggi, lahan perkebunan mulai digarap secara meluas oleh masyarakat. Karena sistem pengairan persawahan di Aceh Utara masih bergantung pada irigasi tradisional, dan sebagian besar sawah di sana masih berupa sawah tadah hujan, potensi pertanian di wilayah tersebut masih belum dapat diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kabupaten Aceh Utara memiliki luas 3.296,86 km², atau 329.689 ha, dan terdiri dari 27 kecamatan, 70 pemukiman, dan 852 gampong secara administratif. Adapun luas dari 27 kecamatan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Profil Kabupaten Aceh Utara

No	Kecamatan	Luas Kecamatan	Jumlah Kemukiman	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1.	Sawang	384,65	2	39	36 502,00
2.	Nisam	114,74	3	29	18 223,00
3.	Nisam Antara	84,38	1	6	12 981,00
4.	Banda Baro	42,35	1	9	7 841,00
5.	Kuta Makmur	151,32	3	39	23 621,00
6.	Simpang Keramat	79,78	2	16	9 330,00

7.	Syamtalira Bayu	77,53	4	38	20 138,00
8.	Geureudong Pase	269,28	-	11	4 812,00
9.	Meurah Mulia	202,57	3	50	18 908,00
10.	Matang Kuli	56,94	4	49	17 766,00
11.	Paya Bakong	418,32	4	39	13 614,00
12.	Pirak Timu	67,70	2	23	7 952,00
13.	Cot Girek	189,00	3	24	19 838,00
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4	47	42 794,00
15.	Langkahan	150,52	3	23	22 438,00
16.	Seunuddon	100,63	3	33	24 822,00
17.	Baktiya	158,67	3	57	35 437,00
18.	Baktiya Barat	83,08	3	26	18 328,00
19.	Lhoksukon	243,00	4	75	48 080,00
20.	Tanah Luas	30,64	3	57	23 897,00
21.	Nibong	44,91	2	20	9 778,00
22.	Samudera	43,28	3	40	26 538,00
23.	Syamtalira Aron	28,13	4	34	17 798,00
24.	Tanah Pasir	20,38	1	18	8 915,00
25.	Lapang	19,27	1	11	8 538,00
26.	Muara Batu	33,34	2	24	26 623,00

27.	Dewantara	39,47	2	15	47 449,00
-----	-----------	-------	---	----	-----------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

4.2. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara

Menurut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, perangkat daerah ini bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah dan berada di bawah kendali Bupati.

4.2.1 Tugas, Fungsi, dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;

2. Pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran Kepala BPBD sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Mereka bekerja sama dengan tim BPBD dan berbagai pihak terkait untuk melindungi masyarakat dan aset daerah dari dampak bencana, serta memastikan pemulihan yang cepat dan berkelanjutan setelah bencana terjadi.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab untuk membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini prabencana, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. Bidang ini memainkan peran penting dalam mengurangi resiko bencana.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik bertanggung jawab untuk membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital. Ini penting untuk memastikan bahwa tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggung jawab untuk membantu Kepala Pelaksana melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kondisi sosial, budaya, dan pelayanan penting dalam masyarakat pasca bencana. Bidang ini sangat penting untuk memastikan pemulihan yang efektif dan

berkelanjutan setelah bencana. Infrastruktur dan sarana prasarana dipulihkan oleh bidang ini.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran bertanggung jawab untuk membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana, dan melindungi masyarakat dan aset dari bahaya kebakaran. Bidang ini bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat aman dan selamat. Bidang ini tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsinya di dalam penelitian peneliti, tapi dimasukkan karena bidang pemadam kebakaran juga salah satu dari 4 bidang yang ada di BPBD Aceh Utara.

4.3. Hasil dan Pembahasan

4.4. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara

Badan Penanggulangan Bencana yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi resiko akibat bencana alam telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Pada umumnya, pemerintah memiliki peran dalam berbagai bentuk termasuk tugas pengaturan, pembuatan berbagai kebijakan, layanan masyarakat, penegakan hukum, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan.

4.4.1. Pra Bencana

Pencegahan bencana merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mengurangi dan mengatasi resiko bencana, dengan mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang berpotensi terkena bencana. Tujuan dari tahap pra bencana adalah untuk pengembangan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu, kelompok, dan lembaga dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini meliputi pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk respons yang efektif.

Dengan melakukan tahap pra bencana dengan baik, diharapkan dapat mengurangi kerugian maupun dampak negatif yang disebabkan oleh bencana, serta mengembangkan keahlian individu dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Untuk regulasi yang menjadi pedoman peneliti yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 10 telah dijabarkan tentang melaksanakan tugas dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.¹

¹ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 10

Wawancara dengan Mulyadi, S.Kep., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“Untuk pencegahan banjir itu sendiri kami sudah melakukan mitigasi/sosialisasi yang memberikan pelatihan tentang kesiapan dalam menghadapi bencana, membuat pamflet/himbauan pada daerah-daerah yang sering terjadi bencana, membuat jalur evakuasi di daerah-daerah yang rawan banjir, dan membangun shelter/posko untuk pengungsian” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2023)²



Gambar 4.1: Mitigasi Bencana

Sumber: Hasil Penelitian

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu Rabiah dan Ainul Mardiah yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“...untuk pelatihan tentang kebencanaan sudah ada dilakukan baik bagi masyarakat maupun bagi para pelajar SMP-SMA yang dilakukan di sekolah...” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)³

² Hasil Wawancara dengan Mulyadi, S.Kep., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal 19 Juni 2023

³ Hasil Wawancara dengan masyarakat Rabiah dan Ainul Mardiah yang terdampak banjir pada tanggal 21 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan bukti pengamatan di lapangan bahwasanya telah adanya pemenuhan program mitigasi kebencanaan yang mana hal ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk proses kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan pemenuhan dalam pelaksanaan program mitigasi kebencanaan bagi masyarakat berarti telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pra bencana.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu Ibrahim dan Syukri yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“Untuk tempat pengungsian kami sudah disediakan beberapa tempat pengungsian yang berada di Meunasah kami, karena gampong kami paling sering banjir jadi kami sangat memerlukan tempat pengungsian yang layak dan mudah dijangkau oleh masyarakat...” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)⁴

Dari hasil wawancara di atas serta bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya telah adanya pemenuhan pembangunan tempat pengungsian yang sudah di bangun pada daerah-daerah rawan banjir, hal ini menunjukkan sudah adanya program kesiapsiagaan dan pencegahan untuk mengurangi banyaknya korban jiwa maupun harta benda dari masyarakat saat bencana terjadi. Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah

⁴ Hasil Wawancara dengan masyarakat Ibrahim dan Syukri yang terdampak banjir pada tanggal 21 Juni 2023

pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan pemenuhan dalam pembangunan tempat pengungsian pada daerah-daerah rawan banjir menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pra bencana.



Gambar 4.3: Tempat Pengungsian
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selanjutnya wawancara dengan Mulyadi, S.Kep., M.Kes., selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“Karena Kabupaten Aceh Utara adalah daerah yang memiliki dataran rendah, terus curah hujan tinggi, selain itu adanya banjir kiriman dari kabupaten-kabupaten tetangga melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu

sungai (Keureuto, Pirak, dan Ara Kundo), dan juga adanya penebangan hutan liar...” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2023)⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya penyebab Kabupaten Aceh Utara selalu terjadi banjir selain karena meluapnya beberapa sungai yang ada di Aceh Utara, serta adanya juga banjir kiriman dari kabupaten-kabupaten tetangga.

Selanjutnya wawancara dengan Mulyadi, S.Kep., M.Kes., selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...jalur evakuasi dibuat di daerah-daerah yang rawan banjir seperti Desa Tanjong Haji Muda Kecamatan Matangkuli dan Desa Bukit Linteung Kecamatan Langkahan. Serta kami ada membuat desa tangguh bencana dimana masyarakat sudah mengerti dan memahami saat terjadi bencana alam sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri...”



Gambar 4.2: Jalur Evakuasi
Sumber: Dokumentasi Penelitian

⁵ Hasil Wawancara dengan Mulyadi, S.Kep., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal 19 Juni 2023

Dari hasil wawancara di atas serta bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya dari pihak BPBD sudah adanya pemenuhan program kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi bencana banjir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga supaya dapat mengurangi banyaknya korban serta memudahkan masyarakat dalam proses penyelamatan diri mereka sendiri saat banjir terjadi pada saat terjadi bencana dengan sudah dibangunnya jalur evakuasi di daerah rawan banjir.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan pemenuhan dalam pembuatan jalur evakuasi pada daerah rawan banjir menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pra bencana.

Selanjutnya wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD mengatakan bahwa:

“Untuk proses pemantauan kami sudah memiliki 4 tim yang bergerak ke lapangan dan juga berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat untuk melihat kondisi apakah hanya curah hujan yang tinggi atau hanya genangan saja. Proses pemantauan dilakukan pada saat sebelum terjadi banjir dan saat terjadi.” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2023)⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD pada tanggal 19 Juni 2023

Berdasarkan dari Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 10 telah dijabarkan tentang melaksanakan tugas dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.⁷

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan para narasumber, bahwasanya pada tahapan pra bencana telah dilakukan pemenuhan tentang mitigasi mengenai kebencanaan, pembuatan jalur evakuasi serta telah adanya tempat pengungsian yang dibangun di daerah-daerah yang rawan banjir yang merupakan suatu program kesiapsiagaan dan pencegahan. Adapun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan pernyataan yang disebutkan para narasumber telah benar adanya, hal tersebut dibuktikan melalui bukti pengamatan yang sudah terlampir di atas.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya program pada tahapan pra bencana sudah terlaksana dengan baik.

4.4.2. Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan sekumpulan tindakan dan langkah yang diambil untuk merespon dan mengatasi situasi darurat yang timbul akibat bencana. Tanggap

⁷ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017

darurat saat terjadi bencana melibatkan kerja sama dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kesiapan, respon cepat, dan upaya bersama untuk mengurangi resiko dan melindungi masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuan tahap tanggap darurat adalah menyalurkan bantuan darurat kepada korban bencana. Selain itu, upaya dilakukan untuk mengendalikan situasi darurat, mengurangi dampak bencana, dan memulihkan keamanan dan ketertiban.

Untuk regulasi yang menjadi pedoman peneliti yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13 telah dijabarkan tentang melaksanakan tugas di bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pengurusan pengungsi.⁸

Wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“Saat terjadi bencana biasanya menyiapkan keperluan logistik maupun tenda-tenda yang dibutuhkan oleh para pengungsi, dan kita juga menyiapkan perahu karet untuk proses evakuasi untuk hal ini kami juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pada daerah-daerah tidak bisa dijangkau sekalian menyuplai keperluan logistik”(Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)⁹

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu Desa Lawang Ibrahim dan Syukri yang terdampak bencana banjir sebagai berikut:

⁸ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13

⁹ Wawancara dengan Chairuddin, S. Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 23 Juni 2023

“...saat banjir selalu ada penyaluran bantuan sandang dan pangan baik itu dari pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat ikut memberikan bantuan....” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)¹⁰



Gambar 4.4: Bantuan Logistik

Sumber: Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara di atas serta bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya dari pihak BPBD sudah adanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi atau korban banjir. Hal ini meliputi penyediaan tempat perlindungan darurat, makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, dan perawatan medis yang diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan pemenuhan dalam penyaluran kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terkena banjir, hal ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka pada

¹⁰ Wawancara dengan masyarakat yaitu Ibrahim dan Syukri yang berdampak banjir pada tanggal 21 Juni 2023

saat banjir terjadi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang tanggap darurat.

Selanjutnya wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD mengatakan bahwa:

“Untuk ketinggian banjir yang harus dilakukan proses evakuasi dan sudah memerlukan perahu karet itu biasanya pada ketinggian banjir 2-3 meter. Dalam hal ini kami melakukan koordinasi lintas sektor seluruh unsur terlibat di dalamnya baik dari PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan juga TNI/Polri. Seandainya masih ketinggian banjir 1-1,5 meter biasanya masyarakat melakukan evakuasi mandiri ke titik yang lebih aman....” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)¹¹



Gambar 4.5: Proses Evakuasi
Sumber: Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara di atas dan bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya saat terjadi bencana banjir telah adanya dilakukan proses evakuasi/penyelamatan yang dikerahkan untuk menyelamatkan orang-orang dan harta benda dari masyarakat yang terperangkap atau terjebak saat banjir. Hal tersebut sesuai

¹¹ Wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD pada tanggal 21 Juni 2023

dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan proses penyelamatan/evakuasi masyarakat saat banjir terjadi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang tanggap darurat.

Selanjutnya wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“... stakeholder kita sudah cukup bagus untuk koordinasinya baik dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PK, TNI/Polri, Lembaga Kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang bencana. Jadi, semuanya kita rangkum dan kita membentuk suatu pos yaitu Pos Komando yang langsung di bawah pimpinannya dari Kepala BPBD. Segala sesuatu baik itu data maupun informasi yang masuk atau gerakan kegiatan yang dilakukan untuk penanganan bencana itu melalui satu pintu yaitu Pos Komando.” Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)¹²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya Pos Komando yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi untuk mengumpulkan, dan menyebarkan informasi tentang bencana serta mengarahkan kegiatan penanggulangan. Adapun dengan adanya kerjasama antar lintas sektor ini dapat mengatasi kekurangan dalam sumber daya manusia saat proses penyelamatan para pengungsi.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan

¹² Wawancara dengan Chairuddin, S. Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 23 Juni 2023

atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya dilakukan proses komunikasi dan koordinasi untuk mengumpulkan, dan menyebarkan informasi tentang bencana serta mengarahkan kegiatan penanggulangan saat banjir terjadi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang tanggap darurat.

Selanjutnya wawancara dengan Darsa S.Sos selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD mengatakan bahwa:

“..untuk perlindungan kepada kelompok rentan (orang tua, ibu hamil, bayi/balita) biasanya kita harus mendahului mereka daripada orang-orang yang masih kuat/sehat untuk proses evakuasi ke titik yang lebih aman. Kami juga bekerjasama dengan puskesmas setempat untuk memeriksa kelompok rentan tersebut pasca terjadinya bencana alam...” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)¹³

Dari hasil wawancara dan bukti pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya telah adanya pendahuluan evakuasi untuk kelompok rentan, seperti orang tua, ibu hamil, dan bayi/balita adalah langkah yang sangat penting dalam penanganan banjir dan sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena kelompok rentan termasuk ke dalam kelompok prioritas. Bekerjasama dengan puskesmas setempat adalah langkah yang baik untuk memeriksa kondisi kesehatan kelompok rentan pasca bencana alam.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan

¹³ Wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD pada tanggal 21 Juni 2023

atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan telah adanya pendahuluan penyelematan bagi kelompok rentan saat banjir terjadi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang tanggap darurat.



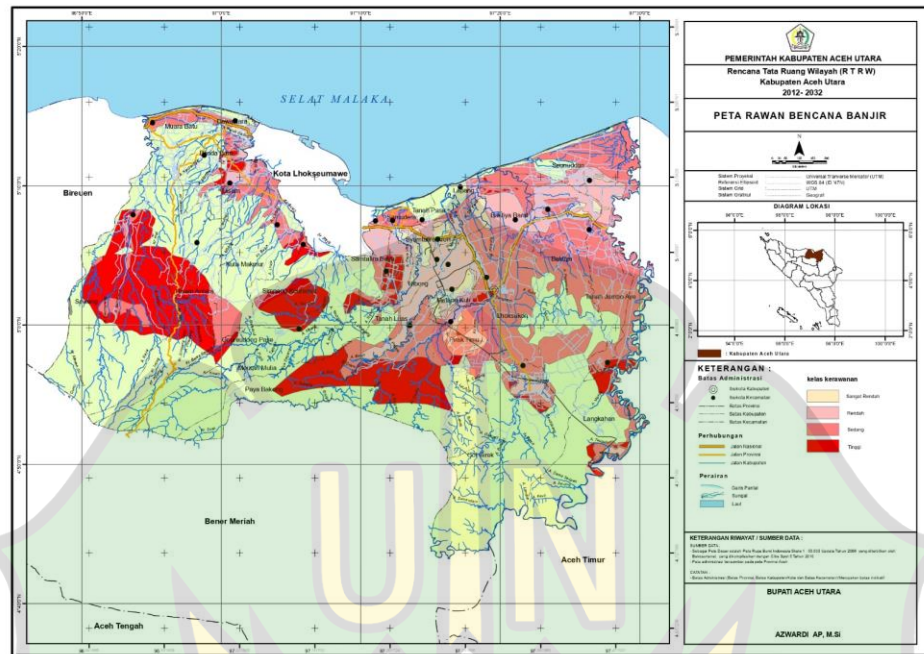
Gambar 4.6: Proses Evakuasi Kelompok Rentan

Sumber: Hasil Penelitian

Selanjutnya wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“Dari kejadian banjir pada tahun 2020 hampir 27 Kecamatan di Aceh Utara itu semuanya terkena banjir. Tetapi daerah yang rawan banjir itu adalah Kecamatan Matangkuli, Langkahan, Lhoksukon, Pirak Timu, Tanah Luas, Paya Bakong, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Samudera, dan Baktiya Barat. Wilayah-wilayah tersebut adalah daerah yang memiliki dataran rendah...”
(Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Chairuddin, S. Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 23 Juni 2023



Gambar 4.7: Peta Daerah Rawan Banjir

Sumber: Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dan bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya tidak sedikit daerah di Kabupaten Aceh Utara yang berpotensi rawan banjir, hal tersebut dapat dibuktikan dari gambar di atas. Daerah-daerah tersebut adalah dataran rendah cenderung lebih rentan terhadap banjir karena memungkinkan air menggenangi dengan mudah. Sehingga diperlukan infrastruktur penyaluran dan pembuangan air yang memadai seperti parit, sungai, dan tanggul untuk mengalirkan air secara efisien dan mengurangi resiko banjir.

Selanjutnya wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“Untuk yang menjadi hambatan dalam penanggulangan banjir di Kabupaten kita ini yaitu karena cakupan wilayah kabupaten Aceh Utara cukup luas dan yang menjadi daerah rawan banjir juga luas jadi masih kekurangan peralatan serta sumber daya manusia untuk proses evakuasi dan diperlukan anggaran operasional yang besar...” (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)¹⁵

Berdasarkan dari Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13 telah dijabarkan tentang melaksanakan tugas di bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pengurusan pengungsi.¹⁶

Selanjutnya dari pernyataan para narasumber, bahwasanya pada tahapan tanggap darurat telah dilakukan pemenuhan tentang penyaluran kebutuhan dasar terhadap para pengungsi baik dari makanan hingga keperluan obat-obatan, telah adanya bantuan dalam proses penyelamatan atau evakuasi yang dilakukan dari pihak BPBD maupun dari lintas sektor terhadap para korban banjir dan harta benda dari masyarakat, serta telah dilakukan pemenuhan perlindungan terhadap kelompok rentan yang sudah seharusnya diprioritaskan.

Adapun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan dengan pernyataan yang disebutkan oleh para narasumber benar adanya, hal tersebut dibuktikan melalui bukti pengamatan yang sudah terlampir di atas. Hal tersebut sesuai juga dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah

¹⁵ Wawancara dengan Chairuddin, S. Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 23 Juni 2023

¹⁶ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13

(*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya program pada tahapan tanggap darurat sudah terlaksana dengan baik.

4.4.3. Pasca Bencana

Tahap pasca bencana ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk memulihkan daerah yang terkena bencana dan membantu masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka. Rehabilitasi adalah pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sedangkan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Untuk regulasi yang menjadi pedoman peneliti yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 16 Tentang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan

peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana.¹⁷

Wawancara dengan Alfian, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengatakan bahwa:

“...upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah pasca bencana pertama kita melakukan pendataan kerusakan dan menghitung kerugian kita melihat juga apa saja yang dibutuhkan seperti pembuatan tanggul, jembatan dan itu memang BPBD sendiri itu tidak ada anggaran khusus untuk perbaikan itu, tapi kita bekerjasama dengan PUPR, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, dan kita meminta bantuan juga dengan instansi induk yaitu BNPB melalui dana hibah untuk perbaikan dari sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir, pembangunan bendungan untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi yang sudah dalam proses pembangunan dari tahun 2017...” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)¹⁸



Gambar 4.8: Bendungan Keureuto
Sumber: Hasil Penelitian

Dari wawancara di atas dan bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya tugas pokok dan fungsi BPBD umumnya yaitu melaksanakan upaya

¹⁷ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 16

¹⁸ Wawancara dengan Alfian, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tanggal 21 Juni 2023

penanggulangan bencana, termasuk pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Adapun dari pengamatan di lapangan dapat dibuktikan bahwa sudah adanya pembangunan bendungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi penyebab terjadinya banjir, tetapi masih dalam proses pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan sedang adanya pembangunan bendungan pada daerah rawan banjir. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pasca bencana.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu Syukri dan Ibrahim yang terdampak bencana banjir sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat sendiri kami sangat mendukung kinerja dari pemerintah daerah maupun badan penanggulangan bencana daerah, kami berharap dengan mereka juga tanggap dalam membangun fasilitas penanggulangan banjir serta memperbaiki fasilitas yang rusak akibat banjir selalu terjadi contohnya seperti jalan di gampong kami itu yang paling rusak dibanding dengan gampong-gampong lainnya...”(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)¹⁹

Dari hasil wawancara di atas serta bukti pengamatan di lapangan sudah adanya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir tetapi

¹⁹ Wawancara dengan masyarakat yaitu Syukri dan Ibrahim yang terdampak banjir , pada tanggal 21 Juni 2023

masih belum secara merata dikarenakan daerah rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara sangat luas, hal ini dapat dibuktikan pada gambar 4.7 di atas. Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan sedang adanya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir, walaupun masih belum merata. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pasca bencana.



Gambar 4.9: Kondisi Jalan di Area Rawan Banjir
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selanjutnya wawancara dengan Alfian, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengatakan bahwa:

“...pastinya banjir ini banyak berdampak bagi masyarakat, dari fasilitas yang rusak dan juga kerugian ekonomi akibat gagal panen yang dialami oleh masyarakat. Luas lahan yang berdampak gagal panen di wilayah Aceh Utara ini yang paling tinggi seluas 6.776 hektare. Pemerintah dengan bantuan BNPB dan DISTANBUM telah menyalurkan bantuan dana siap pakai dan bantuan benih bagi para petani yang terdampak banjir...”(Wawancara pada tanggal 19 Juni 2023)²⁰

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat yaitu Rabiah dan Ainul Mardiah yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

“..karena gampong kami sering banjir, jadi dampak yang kami rasakan yaitu saat banjir itu terjadi sawah kami tenggelam yang menyebabkan gagal panen. Hal ini selalu terjadi saat banjir, kami yang rata-ratanya sumber penghasilan dari hasil panen menyebabkan kesulitan ekonomi apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi untungnya ada sedikit bantuan dari pemerintah berupa dana serta benih yang disalurkan..” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)²¹

Dari wawancara di atas dan bukti pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya tugas pokok dan fungsi BPBD juga dengan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan dan peningkatan kondisi sosial, hal ini telah adanya penyaluran bantuan yang disalurkan oleh Distanbum diberikan kepada para masyarakat yang terdampak banjir dan mengalami gagal panen akibat banjir. Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Dengan sudah adanya bantuan yang disalurkan kepada para petani yang gagal panen

²⁰ Wawancara dengan Alfian, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tanggal 19 Juni 2023

²¹ Wawancara dengan masyarakat yaitu Rabiah dan Ainul Mardiah yang berdampak banjir, pada tanggal 21 Juni 2023

akibat banjir. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah adanya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di bidang pasca bencana.



Gambar 4.10: Asuransi Usaha Padi

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan dari Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 16 Tentang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana.²²

Selanjutnya dari pernyataan para narasumber, bahwasanya pada tahapan pasca bencana telah adanya pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak akibat

²² Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 16

banjir tetapi belum secara merata, karena cakupan wilayah rawan banjir yang cukup luas dan anggaran yang dimiliki terbatas. Adapun hal lain yaitu telah adanya pembangunan bendungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tetapi masih dalam proses pembangunan menurut perkiraan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia akan rampung diakhir tahun 2023.

Selain kerusakan fasilitas sarana dan prasarana, ada juga dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat di daerah rawan banjir yaitu kerugian yang berdampak terhadap perekonomian para masyarakat akibat banjir yang menyebabkan gagal panen. Menurut data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Distanbun) persawahan yang berdampak banjir di Aceh Utara seluas 6.776 hektare yang tersebar di 18 kecamatan. Dalam hal tersebut telah adanya bantuan yang diberikan oleh Distanbun untuk menyalurkan bantuan benih sebanyak 82,4 ton benih untuk 3.297 hektare dan seluas 314 hektare mendapat asuransi sebesar Rp 6 Juta untuk setiap hektare, sehingga dalam hal ini dapat sedikit meringankan kerugian yang dialami oleh para masyarakat.

Hal tersebut sesuai juga dengan teori peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah menurut Tjandra adalah pemerintah (*government*) diharuskan memberikan pengarahan atau administrasi yang berwenang terhadap kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota dan lain-lain. Adapun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan dengan pernyataan yang disebutkan oleh para narasumber belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dibuktikan melalui bukti pengamatan yang sudah terlampir di atas. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwasanya program pada tahapan pasca bencana belum terlaksana sepenuhnya.

4.4. Hambatan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 gampong serta 27 kecamatan dan yang termasuk daerah yang berpotensi rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara ada 19 kecamatan yaitu Kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Pirak Timu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon, Cot Girek, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Geureudong Pase, Simpan Kramat, Sawang, Muara Batu, dan Kuta Makmur. Penyebab banjir tersebut selain dari faktor meluapnya air sungai juga dikarenakan oleh jebolnya tanggul penahan.

Wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“Untuk yang menjadi hambatan dalam penanggulangan banjir di Kabupaten kita ini yaitu karena cakupan wilayah kabupaten Aceh Utara cukup luas dan yang menjadi daerah rawan banjir juga luas jadi masih kekurangan peralatan serta sumber daya manusia untuk proses evakuasi dan diperlukan anggaran operasional yang besar...” (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)²³

Dari hasil wawancara di atas serta dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada gambar 4.7 yaitu luas daerah-daerah rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Daerah-daerah tersebut adalah dataran rendah cenderung lebih rentan terhadap banjir karena memungkinkan air menggenangi dengan mudah. Sehingga diperlukan infrastruktur

²³ Wawancara dengan Chairuddin, S. Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 23 Juni 2023

penyaluran dan pembuangan air yang memadai seperti parit, sungai, dan tanggul untuk mengalirkan air secara efisien dan mengurangi resiko banjir.

Selanjutnya wawancara dengan Darsa S.Sos selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD mengatakan bahwa:

“...kita hanya memiliki beberapa peralatan untuk proses penyelamatan atau evakuasi para pengungsi seperti perahu karet, sehingga jika banjir terjadi secara menyeluruh kita masih kekurangan peralatan diperlukan untuk penanganan...”
(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)²⁴

Adapun beberapa peralatan dan perlengkapan yang sangat penting untuk dipersiapkan agar dapat menghadapi banjir dengan lebih baik dan lebih aman. Berikut adalah beberapa peralatan yang dibutuhkan saat menghadapi banjir:

- 1) Perahu karet atau perahu penyelamat adalah salah satu peralatan terpenting untuk mengakses daerah tergenang air atau untuk evakuasi jika air naik dengan cepat. Pastikan perahu karet berada dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan pompa air untuk mengeluarkan air yang masuk.
- 2) Pelampung dan jaket pelampung. Jika Anda harus berada di air, pastikan Anda memiliki pelampung dan jaket pelampung yang memenuhi standar keselamatan. Ini membantu menjaga tubuh tetap mengapung dan mengurangi risiko tenggelam.
- 3) Peralatan komunikasi. Saat banjir, akses ke komunikasi menjadi sangat penting. Selalu siapkan peralatan komunikasi seperti telepon seluler, walkie-talkie, atau radio baterai yang dapat digunakan untuk memanggil bantuan atau berkomunikasi dengan orang lain.

²⁴ Wawancara dengan Darsa S.Sos., selaku Koordinasi Lapangan dari BPBD pada tanggal 21 Juni 2023

Selanjutnya wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

“...karena kabupaten kita yaitu daerah yang rawan banjir jadi stakeholder kita sudah cukup bagus untuk koordinasinya dalam penanganan banjir baik itu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PK, TNI/Polri, Lembaga Kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang bencana, hal ini sangat membantu sekali saat banjir terjadi bersamaan di beberapa tempat yang berbeda”(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)²⁵

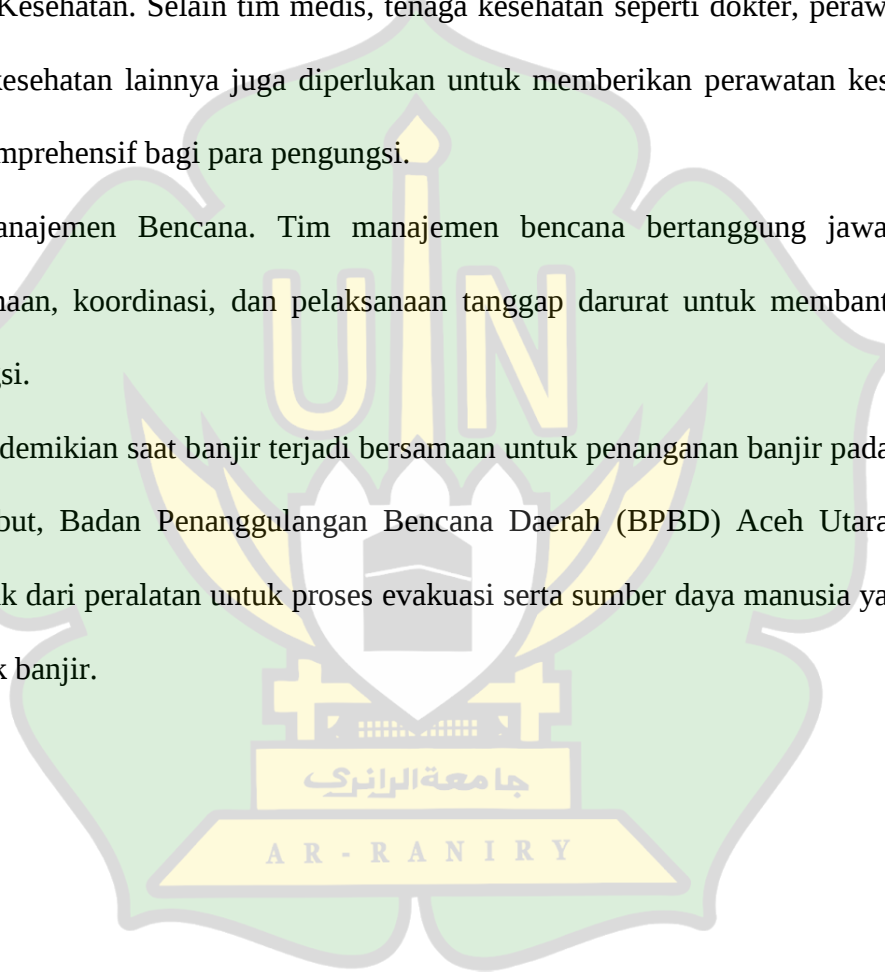
Sumber daya manusia yang dapat membantu dalam penyelamatan dan pendampingan para pengungsi dapat mencakup dari berbagai peran dan keterampilan. Berikut beberapa contoh sumber daya manusia yang berperan dalam memberikan bantuan kepada pengungsi, yaitu:

- 1) Tim Penyelamat dan Tim Medis. Tim penyelamat terlatih dan tim medis adalah elemen kunci dalam situasi darurat. Mereka dapat membantu dalam evakuasi pengungsi dari daerah berbahaya dan memberikan pertolongan pertama bagi yang membutuhkan perawatan medis.
- 2) Relawan Evakuasi dan Distribusi Bantuan. Relawan yang berpartisipasi dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan darurat seperti makanan, air bersih, pakaian, dan perlengkapan lainnya sangat berarti bagi para pengungsi.
- 3) Koordinator Logistik. Koordinator logistik membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan distribusi bantuan serta pengaturan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang efisien bagi para pengungsi.

²⁵ Wawancara dengan Chairuddin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tanggal 21 Juni 2023

- 4) Tenaga Pendidik dan Pengajar. Bagi pengungsi, terutama anak-anak, mendapatkan akses ke pendidikan menjadi sangat penting. Tenaga pendidik dan pengajar dapat membantu menyediakan fasilitas pendidikan darurat bagi pengungsi.
- 5) Tenaga Kesehatan. Selain tim medis, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya juga diperlukan untuk memberikan perawatan kesehatan yang komprehensif bagi para pengungsi.
- 6) Tim Manajemen Bencana. Tim manajemen bencana bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat untuk membantu para pengungsi.

Dengan demikian saat banjir terjadi bersamaan untuk penanganan banjir pada setiap daerah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara harus membagi baik dari peralatan untuk proses evakuasi serta sumber daya manusia yang ada ke setiap titik banjir.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara sudah baik, ini terlihat dalam peranan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana dengan baik, penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya kondisi yang baik dengan instansi atau dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada kondisi yang baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

1. Pada tahapan pra bencana sudah berjalan dengan baik, dengan terlaksananya program mitigasi dan sosialisasi tentang kebencanaan yang diberikan kepada masyarakat dewasa maupun para pelajar, serta telah adanya pembangunan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang dibangun di daerah-daerah rawan banjir,
2. Pada tahapan tanggap darurat sudah berjalan dengan baik, dengan adanya penyaluran bantuan logistik, melaksanakan proses penyelamatan atau evakuasi bagi korban banjir, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang diprioritaskan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas daerah setempat.

3. Pada tahapan pasca bencana yang masih belum terlaksana dengan sepenuhnya.

Adapun hal yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu pembangunan fasilitas penanggulangan banjir yang masih dalam proses pembangunan, serta pemulihan fasilitas sarana dan prasarana yang dilakukan belum secara merata. Selain kerusakan fasilitas ada juga fenomena lain yang dialami oleh masyarakat yang terdampak akibat banjir yang menyebabkan terjadinya gagal panen, hal tersebut mengakibatkan kerugian sehingga terjadinya penurunan perekonomian bagi para masyarakat. Namun dengan sudah adanya bantuan asuransi usaha tani yang disalurkan kepada petani yang berdampak gagal panen.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara sebaiknya membangun tanggul di daerah-daerah yang rawan banjir. Tanggul yang dirancang dengan baik dan memadai dapat menghambat aliran air banjir dan mencegah air masuk ke daerah yang dilindungi. Dengan demikian, tanggul membantu mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh banjir.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara sebaiknya terus meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia, kapasitas organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kolaborasi. Masyarakat di sekitar lokasi bencana harus dilindungi untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian materi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kenneth, Gary A. Yuki. 2008. *Perilaku Organisasi Dan Psikologi Personalia*. Jakarta: Rineka Cipta. 22-25
- Lexy, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. in *Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 54
- Lubis, Huseini. 2010. *Organization Management Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI. 48
- Martoyo, Susilo. 2007. *Perilaku Organisasi*, in *Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2007. 36
- Rachmawatie, Srie Julie. 2016. *Ensiklopedia Mitigasi Bencana Banjir*. Surakarta: PT Borobudur Inspira Nusantara. 32-47
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori Ke Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 43
- Sanafiah, Faisal. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 67
- Sondang, Siagian. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 34-37

Jurnal:

- Afiah, Dra. Hj. Sri. 2016. *Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Thesis. 22-27
- Faturrahman. 2018. *Konseptualisasi Mitigasi Becana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. 3.(2). 7-10
- Ramadhan, Matondang. 2016. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik.. 4(2), 176–186
- Anggita. 2020. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2(5).

23-33

Suryadi, Novan. 2020. *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir DI Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. 36-40

Regulasi/ Undang-Undang:

BNPB. Panduan Perencanaan Kontinjensi dalam Menghadapi Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011)

Departemen Komunikasi dan Informasi, 2007: 12

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Website:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, *BENCANA*
<https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> (di akses pada 18 Januari 2023)

Badan Pusat Statistik, *Rekap Data Bencana Aceh*
<https://data.acehprov.go.id/id/dataset/rekap-data-bencana> (di akses pada 20 Januari 2023)

Nora, 'Kondisi Bencana Alam Di Aceh Tiga Tahun Terakhir', 2022
<https://dialeksis.com/data/kondisi-bencana-alam-di-aceh-tiga-tahun-terakhir> (di akses pada 22 Januari 2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1095/Un.08/FISIP, I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nurul Sahira / 190802118**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Peurada, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 2 : Dokumentasi Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Nurul Sahira
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Utara/ 09 September 2001
Nomor Handphone : 082362510917
Alamat : Desa Dayah, Kec Nibong, Kab Aceh Utara
Email : 190802118@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 3 Nibong Aceh Utara
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 7 Aceh Utara
Sekolah Menengah Atas : SMKN Penerbangan Aceh

Sertifikat

Ma'had Jami'ah : B/2021/ Ma'had Jami'ah
TOEFL : 417/2023/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL : 400/2023/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A/2023/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : A/2022/Bappeda Aceh

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Nurul Sahira

NIM. 190802118